

BAB VI

PENUTUP

6.1.Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pendalaman berbagai data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan berpijak serta berlandaskan pada teori untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan maka penulis mengambil kesimpulan bahwa, salah satu strategi dalam mengatasi ketidak disiplin perangkat pemerintah desa yaitu dengan pengimplementasian kebijakan disiplin preventif dan korektif. Kedisiplinan perangkat desa. Kedisiplinan perangkat/pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi masyarakat, yang membantu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat pada kedisiplinan perangkat/pemerintah Desa dalam menjalankan tugasnya, sebagai abdi masyarakat. Kebijakan kepala desa sangat berperan penting dalam mengawasi atau mengontrol pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh para perangkatnya, sehingga menyebabkan kedisiplinan dari para perangkat/pemerintah Desa dapat ditingkatkan.

Jadi, dengan kedisiplinan perangkat/pemerintah desa tersebut maka desa manubelon yang merupakan salah satu desa dikecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang telah berupaya untuk mengatasi ketidak disiplin perangkat/pemerintah desa dengan regulasi yang telah dibuat bersama melalui musyawara pada tanggal 13 januari 2014. Serta upaya yang dilakukan oleh kepala

desa belum maksimal dalam mengatasi ketidak disiplin pegawai namun sudah ada perubahan dari perangkat desa.

Maka dari itu, penulis menawarkan dua aspek untuk mengukur efek yang diberikan baik dari regulasi maupun upaya dari kepala desa dalam mengatasi ketidak disiplin pegawai yaitu:

1. Aspek preventif adalah pegawai harus mengikuti pedoman kerja dan menaati aturan yang telah disepakati serta atasan dan bawahan harus disiplin diri, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai dalam mengikuti pedoman kerja, serta atasan dan bawahan harus disiplin diri.
2. Aspek korektif adalah peringatan atau skorsing kepada pegawai yang tidak disiplin dan atasan harus bersikap tegas agar pegawai tidak melakukan kesalahan yang sama, yang bertujuan untuk mengukur tingkat kedisiplinan pegawai setelah diberikan skorsing atau peringatan, mengukur ketegasan dari kepala desa terhadap pegawai agar tidak melakukan kesalahan yang sama serta melihat peraturan tertulis mengenai kedisiplinan.

Akan tetapi, perlunya pembuatan regulasi mengenai sanksi-sanksi terhadap pegawai yang tidak disiplin dan perlunya ketegasan dari kepala desa dalam mengatasi pegawai yang tidak disiplin sehingga pegawai dapat disiplin dalam bekerja dan pelayanan terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

6.2 saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada yang berkaitan dengan implementasi kebijakan disiplin preventif dan korektif dalam perangkat pemerintah Desa Manubelon

Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Untuk kepala desa manubelon diharapkan untuk membuat regulasi mengenai sanksi-sanksi terhadap perangkat desa yang tidak disiplin.
2. Perlunya ketegasan terhadap perangkat desa yang tidak disiplin
3. Harus adanya Absensi bagi perangkat pemerintah Desa
4. Bagi masyarakat desa Manubelon agar tetap mengawasi perangkat desa manubelon yang tidak disiplin dalam melakukan pelayanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ahmad Tohardi,(2002),*Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*,UniversitasTanjungPura, MandarMaju, Bandung
- Alex. S. Nitisemito (1992) *Manajemen dan Sumber Daya Manusia*. BPFE UGM, Yogyakarta
- Awang, azam 2010, *Implementasi kebijakan pemerintah desa*, Yogyakarta: pustakapelajar
- Dunn.W.N 2000, *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua*(terjemahansamodrawibawa, dianasitadani, Erwanaguspurwanto). Gajah mada university press.
- Fathoni, 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*RinekaCipta, Bandung.
- Handoko 1996, *Manajemen Personalia dan sumber daya manusia*, Yogyakarta: BPFE.
- LexyMoleong (1998) *Metodologi Penelitian Kualitatif*.RemajaRosda. Karya. Bandung, 2002
- .Marshall, *Implementasi kebijakan publik* (EdisiRevisi), Jakarta, 2003.
- Ranupandojo 1990, *Manajemen Personalia*(Jilid 4). Yogyakarta:BPFE
- Rasyid, M, Ryass(1997)*Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru* jakarta: MIPI, Yarsip.
- SiswantoSastrohadiwirdjo 2003, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi dan Operasional*. Jakarta: BumiAksara.
- pramudji 1992, *kepemimpinan pemerintahan diindonesia*.

Bumiaksara: Jakarta.

Sinambela, Lijuan:Poltak, 2012. *Kinerja Pegawai*, Yogyakarta: GrahaIlmu.

Sugiyono 2010,*Metode Penelitian Pendidikan dan Pendekatan Kualitatif dan R dan D*.Bandung : ALFABETA.

Tangkilisan 2003, *Implementasi kebijakan publik* Yogyakarta: Lukaman Offset

YPADI

Winardi 2002, *Motivasi dan Permotivasi Dalam Manajement*, Jakarta:PT. Grafindo. Persada.

Skripsi

MikhaelBili Bora.”*Implementasi fungsi BPD Dalam merancang dan menetapkan perdes di Desa Weepangali Kecamatan Loura Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2007-2008*” (Ilmupemerintahan, F.ISIP, Unwirakupang 2008)

Mariani Barbara Bota.”*Implementasi kebijakan Otonomi Desa di Desa Tuapukan Kecamatan kupang Timur Kabupaten Kupang*’ (Ilmupemerintahan, F.ISIP, UnwiraKuapng 2003